



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

I. PENDAHULUAN

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 72. Berdasarkan hal tersebut maka Kami sampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sebagai berikut :

A. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur dan merupakan batas Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah, sekaligus sebagai pintu gerbang Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah seluas 1.070,28 Km² (107.028 Ha) dan posisinya sangat strategis karena terlewati oleh jalur lintas Jakarta – Jawa.

a. Letak Wilayah

Kabupaten Cirebon terletak diantara 06° 30' Lintang Selatan sampai dengan 07° 00' Lintang Selatan dan diantara 108° 19'30" Bujur Timur sampai dengan 108 ° 50'03" Bujur Timur, dengan batas administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa

Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan

Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka

Sebelah Timur : Kota Cirebon dan Kabupaten Brebes (Prov. Jawa Tengah)

b. Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006, Kabupaten Cirebon terbagi menjadi 40 Kecamatan, 412 Desa dan 12 Kelurahan.

B. Gambaran Umum Demografis

Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022 berpenduduk 2.380.074 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 1.207.081 jiwa, penduduk perempuan 1.172.993 jiwa (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, 2022). Pada Tahun 2022, Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Sumber sebanyak 99.953 jiwa dan Kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Pasaleman sebanyak 28.655 jiwa.



II. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Pencapaian kinerja makro Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

No	Indikator kinerja Makro	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,12	70,06	0,94
2	Angka Kemiskinan	12,30	12,01	-0,29
3	Angka Pengangguran	10,38	8,11	-2,27
4	Pertumbuhan Ekonomi	2,47	4,09	1,62
5	Pendapatan Per kapita (Juta Rp)	22.83	24,47	1,64
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,339	0,336	-0,003

III. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, sosial dan ketentraman dan ketertiban, Capaian kinerja Urusan Pelayanan Dasar Merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan daerah. Adapun capaian pelayanan dasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Tahun 2022, sebagai berikut :

NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	62,68%	Dinas Pendidikan	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	85,36%	Dinas Pendidikan	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	74,55%	Dinas Pendidikan	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	30,98%	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,10%	Dinas Kesehatan	



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	66,67%	Dinas Kesehatan	
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95,54%	Dinas Kesehatan	
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	93,21%	Dinas Kesehatan	
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93,45%	Dinas Kesehatan	
		6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	99,61%	Dinas Kesehatan	
		7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,33%	Dinas Kesehatan	
		8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	87,05%	Dinas Kesehatan	
		9	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	81,33%	Dinas Kesehatan	
		10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	70,02%	Dinas Kesehatan	
		11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91,19%	Dinas Kesehatan	
		12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	91,30%	Dinas Kesehatan	
		13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	93,54%	Dinas Kesehatan	
		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	89,88%	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	Dinas PUTR	
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00%	Dinas PUTR	
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	33,11%	Dinas PUTR	
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	100,02%	Dinas PUTR	



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	89,22%	Dinas PUTR	
		6	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	100,00%	Dinas PUTR	
		7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	84,12%	Dinas PUTR	
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	37,69%	Dinas PUTR	
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100,00%	Dinas PUTR	
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	0,00%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi	0,00%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	49,98%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	1,27%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1,69%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00%	Satpol PP	
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00%	Satpol PP	
		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	1.050	BPBD	
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.050	BPBD	
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	76.771	BPBD	
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	88,57%	Dinas Damkar dan Penyelamatan	
		7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,41 Menit	Dinas Damkar dan Penyelamatan	
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	94,95%	Dinas Sosial	



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100,00%	Dinas Sosial	
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100,00%	Disnaker	
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,77%	Disnaker	
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	45,72%	Disnaker	
		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	43,66%	Disnaker	
		5	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	72,52%	Disnaker	
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase ARG pada belanja langsung	0,07%	DPPKBP3A	
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	0,01%	DPPKBP3A	
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,01%	DPPKBP3A	
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,00%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0,00%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang selesai tepat waktu	100,00%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0,00%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0,00%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0,00%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100,00%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
11	Lingkungan Hidup	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	57,09%	Dinas Lingkungan Hidup	



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	30,32%	Dinas Lingkungan Hidup	
		3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	46,91%	Dinas Lingkungan Hidup	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Perekaman KTP Elektronik	98,99%	Disdukcapil	
		2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	31,32%	Disdukcapil	
		3	Kepemilikan akta kelahiran	93,06%	Disdukcapil	
		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	5,63%	Disdukcapil	
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0,00%	DPMD	
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	1,08%	DPMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,24	DPPKBP3A	
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	72,57%	DPPKBP3A	
		3	Persentase Kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	26,36%	DPPKBP3A	
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,63%	Dishub	
		2	V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,78 V/C	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100,00%	Diskominfo	
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100,00%	Diskominfo	
		3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75,31%	Diskominfo	
17	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	16,97%	Dinkop dan UKM	
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	0,18%	Dinkop dan UKM	
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	119,14%	DPMPSTP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,01%	Dispورا	
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	3,73%	Dispورا	
		3	Peningkatan prestasi olahraga	62	Dispورا	
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	43,66%	Diskominfo	



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	43,66%	Diskominfo	
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	33,33%	Diskominfo	
22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100,00%	Disbudpar	
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	44,63 (Sedang)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	2,41685	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	68,49%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	75,00%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	56.783,78 Ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	73,67%	Disbudpar	
		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	55,39%	Disbudpar	
		3	Tingkat hunian akomodasi	29,83%	Disbudpar	
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	3,22%	Disbudpar	
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	5,45%	Disbudpar	
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	622,91%	Dinas Pertanian	
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	-83,33%	Dinas Pertanian	
28	Energi dan Sumber Daya mineral	1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0,00%	Bukan Kewenangan Kab/Kota	
29	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Disdagin	
		2	Persentase kinerja realisasi pupuk	86,92%	Disdagin	
		3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang Berlaku	59,40%	Disdagin	
30	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1,50%	Disdagin	



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indicator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0,00%	Disdagin	
		3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1,89%	Disdagin	
		4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0,00%	Disdagin	
		5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kab/Kota	0,00%	Disdagin	
		6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	125%	Disdagin	
31	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan Dan Keuangan)	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	15,62%	BKAD	
		2	Rasio PAD	20,08%	BKAD	
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Inspektorat	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	72,13%	BKAD	
		6	Opini Laporan Keuangan	WTP	BKAD	
32	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan)	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0,00%	Bagian Barjas Setda	
		2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	17,62%	Bagian Barjas Setda	
		3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	10,13%	Bagian Barjas Setda	
		4	Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-12,78%	Bagian Barjas Setda	
33	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian)	1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	238,31%	BKPSDM	
		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,06%	BKPSDM	



NO	URUSAN	NO IKK	IKK OUTCOME	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	53,81%	BKPSDM	
34	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan)	1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	16,50%	BKAD	
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	9,93%	BKAD	
		3	Assets Management	Ada	BKAD	
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	9,59%	BKAD	
35	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	97,09%	Diskominfo	
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100,00%	Diskominfo	

IV. HASIL EPPD DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH

A. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 5 Tahun terakhir didapatkan hasil sebagai berikut:

Uraian	Skor Kinerja Tingkat Nasional	Kategori Kinerja Tingkat Nasional	Peringkat Nasional
EPPD Tahun 2017 terhadap LPPD Tahun 2016	3,2945	Sangat Tinggi	53
EPPD Tahun 2018 terhadap LPPD Tahun 2017	2,6287	Tinggi	316
EPPD Tahun 2019 terhadap LPPD Tahun 2018	3,2618	Sangat Tinggi	n.a
EPPD Tahun 2020 terhadap LPPD Tahun 2019	3,3707	Tinggi	n.a
EPPD Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020	n.a		

B. Opini Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 5 Tahun terakhir didapatkan hasil opini sebagai berikut:

Uraian	Opini Laporan Keuangan Daerah
Opini BPK atas LKD Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Opini BPK atas LKD Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



V. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

NO. Rek	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.994.738.153.840,00	3.960.950.348.873,52	99,15
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	754.196.718.866,00	795.263.789.810,52	105,45
4.1.01.	Pajak Daerah	278.528.660.262,00	308.442.409.838,00	110,74
4.1.02.	Retribusi Daerah	23.353.204.505,00	27.897.867.887,00	119,46
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.633.523.000,00	13.702.211.968,00	142,23
4.1.04.	Lain - Lain PAD yang Sah	442.681.331.099,00	445.221.300.117,52	100,57
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.140.865.591.594,00	3.068.151.089.013,00	97,68
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.777.181.861.268,00	2.706.565.604.541,00	97,46
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	363.683.730.326,00	361.585.484.472,00	99,42
4.3.	LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	99.675.843.380,00	97.535.470.050,00	97,85
5.	BELANJA DAERAH	4.367.668.056.159,00	3.988.922.622.626,00	91,33
5.1.	Belanja Operasi	3.201.257.833.391,60	2.985.149.828.252,00	93,25
5.1.01.	Belanja Pegawai	1.636.167.835.541,00	1.561.612.475.084,00	95,44
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.453.334.913.650,60	1.315.507.381.917,00	90,52
5.1.05.	Belanja Hibah	86.498.821.700,00	83.174.048.251,00	96,16
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	25.256.262.500,00	24.855.923.000,00	98,41
5.2.	Belanja Modal	357.862.834.994,40	314.155.622.794,00	87,79
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	3.491.953.700,00	2.691.148.916,00	77,07
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.055.842.474,00	90.156.368.652,00	73,26
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.305.460.460,40	43.119.333.179,00	91,15
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	183.442.364.660,00	177.695.224.847,00	96,87
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	567.213.700,00	493.547.200,00	87,01
5.3.	Belanja Tidak Terduga	134.826.841.924,00	20.656.013.104,00	15,32
5.3.10.	Belanja Tidak Terduga	134.826.841.924,00	20.656.013.104,00	15,32
5.4.	Belanja Transfer	673.720.545.849,00	668.961.158.476,00	99,29
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	29.119.950.849,00	24.700.989.476,00	84,82
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	644.600.595.000,00	644.260.169.000,00	99,95
SURPLUS / (DEFISIT)		(372.929.902.319,00)	(27.972.273.752,48)	7,50
6	PEMBIAYAAN DAERAH	372.929.902.319,00	372.930.148.719,34	100,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	378.206.410.319,00	378.206.410.319,34	100,00
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	378.206.410.319,00	378.206.410.319,34	100,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.276.508.000,00	5.276.261.600,00	100,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5.276.508.000,00	5.276.261.600,00	100,00
PEMBIAYAAN NETTO		372.929.902.319,00	372.930.148.719,34	
SILPA		0,00	344.957.874.966,86	



VI. INOVASI DAERAH

Dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan tahun 2022 serta efektivitas dan efisien kebijakan maka rangkaian inovasi daerah di berbagai bidang urusan pemerintahan yang diimplementasikan Kabupaten Cirebon diantaranya adalah sebagai berikut :

NO.	URUSAN	INOVASI	KETERANGAN
1	Pendidikan	Paku Bumi (Peduli Anak Kurang Beruntung Menggapai Impian)	Anak pandai dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan sekolah/kuliah
		Program Desa Cerdas	Agar kepala desa menjadi peduli terhadap anak yang putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan sekolah.
		Klinik Baca	Membaut masyarakat semakin gemar membaca di era teknologi dan informasi yang semakin berkembang
2	Kesehatan	Sistem Sigap Cepat Eman Rakyat (SICERIA)	SICERIA adalah Sistem informasi rujukan yang beroperasi 24 jam dan menjadi jembatan komunikasi antar perujuk dengan penerima rujukan, serta dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada proses pelayanan kesehatan rujukan. Pada bulan Pengembangan sistem informasi rujukan ini menjadi Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) melalui PSC (<i>Public Safety Center</i>) SICERIA untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan kegawatdaruratan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak.
		Sistem Informasi Peresepan Obat Elektronik	Pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai berdasarkan resep perorangan yang disiapkan dalam unit dosis tunggal atau ganda, untuk penggunaan satu kali dosis/pasien secara elektronik.
3	Sosial	Sistem Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi dalam Perencanaan dan Penganggaran (SIMNANGKIS-SIMISKIN RANGGA	Inovasi ini bertujuan : mengintegrasikan Basis Data Terpadu (BDT) yang di update oleh Dinas Sosial melalui aplikasi SIKS-NG ke dalam aplikasi SIMNANGKIS sebagai data dasar yang tersaji secara sistematis dan menjadi data resmi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon baik bersifat internal terkait perencanaan tersosialisasikannya "Single Database Kemiskinan" dalam aplikasi SIMNANGKIS sebagai sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan kepada stakeholder yang terkait Pronangkis; Terwujudnya pengembangan sistem lanjutan SIMNANGKIS yang terintegrasi dengan e-Perencanaan dan Penganggaran (SIMISKINRANGGA) berbasis Android berupa penambahan fitur "Raport dan Neraca Kemiskinan" yang menjadi dasar capaian indikator kinerja utama Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dan penginputan data berbasis kewilayahan oleh TKPKD di level kecamatan dan desa; Tersinergikannya program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau rencana kerja tahunan khususnya yang terkait penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Renstra Bappelitbangda dan RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.



NO.	URUSAN	INOVASI	KETERANGAN
4	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Antrian online untuk cetak KTP-EL	Transparansi,efektifitas dan efesiensi
		Two In One: SKPWNI/ SKDWNl dan KK	Efektifitas dan efesiensi waktu pelayanan (satu pelayanan dua produk adminduk)
		Layanan perekaman KTP el Keliling	Efektifitas dan efesiensi (jemput bola) bagi masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan atau letak geografis dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam layanan adminduk (LAYANAN JEMPUT BOLA)
		Pelayanan Akta kelahiran secara online	Transparansi,efektifitas dan efesiensi
		Layanan mobile pembuatan akta kelahiran	Efektifitas dan efesiensi (jemput bola) bagi masyarakat yang jauh dari pusat pelayanan atau letak geografis dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam layanan adminduk (LAYANAN JEMPUT BOLA)
		3 Tier Jarkomdat (Jaringan SIAK,Telkom) Layanan jaringan komunikasi data tidak berhenti	Meningkatkan kelancaran pelayanan adminduk walaupun ada trouble salah satu jaringan jarkomdat
5	Penanaman Modal	Inovasi Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Online	Perizinan online mencakup: 1. Layanan perizinan <i>online</i> -Pengaduan <i>online</i> 2. Monitoring proses izin (<i>online tracking system</i>) 3. Tanda tangan elektronik tersertifikasi (BsrE-BSSN) 4. Survei IKM /SKM <i>Online</i> -Sms Gateway https://izinonline.cirebonkab.go.id/izin/
6	Pertanahan	Pendataan dan Pengukuran Tanah Aset Pemda yang Dimohon SKPD serta Updating Database Pertanahan	Tersedianya data pertanahan sebagai bahan acuan revisi RTRW dan penatagunaan tanah https://localhost/penatagunaan tanah/
7	Kearsipan	Digitalisasi Arsip Vital	Digitalisasi arsip vital merupakan metode perlindungan dan pengamanan arsip vital: - sertifikat tanah pemda/desa - BPKB kendaraan dinas pemda - IMB
8	Perpustakaan	Community Engagement (pelibatan masyarakat)	Menjadikan perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta dalam upaya meningkatkan minat dan budaya baca melalui pemanfaatan perpustakaan
9	Pertanian	SIMTANI	Kompilasi data dan profil pertanian secara real time

VII. PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan gambaran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Cirebon telah diupayakan dengan maksimal agar dapat terlaksana dengan baik. Capaian kinerja yang telah dicapai adalah merupakan hasil kerja yang telah dilakukan selama tahun 2022, dan tidak dipungkiri tentunya banyak



permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga masih ada indikator-indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan.

Berbagai upaya dan terobosan yang progresif, kreatif dan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan akan terus Kami lakukan, kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan seluruh *stakeholders* akan mendukung pencapaian kinerja dan ekspektasi masyarakat. Upaya-upaya untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut akan selalu Kami prioritaskan guna mengakselerasi pencapaian visi dan misi serta penyelesaian agenda pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Demikian gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon sepanjang Tahun 2022 yang kami sampaikan dalam Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai informasi kepada masyarakat. Beberapa capaian kinerja disadari masih belum sepenuhnya mencapai target kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan, baik pada tataran indikator makro maupun kinerja setiap urusan pemerintahan. Hal ini akan menjadi catatan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya agar fungsi dan tugas pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Kabupaten Cirebon dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

Cirebon, 28 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



Drs. H. IMRON, M.Ag.